

WARTA

Gelontorkan Anggarkan Miliaran untuk Pilpanag 2023, Panitia Pemilihan Pangulu di Simalungun Menjerit

Karmel - SIMALUNGUN.WARTA.CO.ID

Mar 7, 2023 - 01:08

kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut penjelasan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun bahwa Anggaran Panitia Pilpanag tidak diterima berupa uang cash kecuali honor Panitia Pilpanag Nagori, selain honor Panitia Pilpanag Nagori biaya ATK, biaya rapat dan biaya lain-lain diterima Panitia Pilpanag berupa barang.
2. Mengenai honor Panitia Pilpanag Nagori sudah di transfer kepada masing-masing Camat, untuk itu diminta kepada Panitia Pilpanag Nagori agar berkoordinasi dengan Camat.
3. Pemerintah Kabupaten Simalungun serius untuk melaksanakan pemilihan Kepala Nagori serentak tahun 2023.
4. Mengenai alat tulis kantor (ATK) Panitia Nagori sudah diserahkan oleh DPMPN kepada masing-masing Camat.
5. Panitia Pilpanag Nagori terhadap agar honor Panitia, ATK, dan biaya makan/minuman rapat dapat diterima oleh Panitia Pilpanag yang ada nagori.
6. Menurut penjelasan dari Kepala Dinas PMPN pembayaran honor Panitia Pilpanag Nagori yang ditampung hanya 2 kali, ATK sudah diserahkan kepada masing-masing Camat dan mengenai biaya rapat tidak ada ditampung pada APBD kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023.
7. Menurut pernyataan Saudara Lambot Haloho selaku Kabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagori pada saat Bimtek di Hotel Patra Jusa Parapat tanggal 28 Nopember 2022 bahwa biaya Honor yang dijanjikan 4 kali namun yang terealisasi hanya 2 kali, ATK dan biaya Rapat akan ditampung pada APBD 2023, namun ternyata tidak terlaksana.
8. Sesuai pernyataan Panitia Pilpanag yang mewakili 12 Nagori jika gaji/honor, ATK dan Biaya Rapat tidak dibayar semua Panitia Pilpanag yang ada di Nagori mengundurkan diri.

Demikian Berita Acara Rapat Dengar Pendapat ini diperbuat untuk dapat ditindaklanjuti.

KOMISI I DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN

KETUA,

ERWIN PARULIAN SARAGIH, ST.

SEKRETERIS,

JARUSDIN SINAGA.

SIMALUNGUN-Sejumlah panitia pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) se-Kabupaten Simalungun kecewa lantaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagori (BPMN) hanya membayarkan dua kali saja honor dengan jumlah 800.000

untuk ketua selama perhelatan

Selain kecewa, Sejumlah panitia pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) atau Tim 11 di tingkat Nagori juga mengancam akan mengundurkan diri karena sampai saat ini, anggaran pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) untuk panitia Nagori tidak jelas.

Terungkapnya honor panitia yang hanya dibayarkan 2 kali saja dan biaya ATK, serta biaya rapat-rapat yang sudah didahulukan panitia tidak tertampung di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Simalungun dengan ratusan perwakilan Panitia Nagori

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Simalungun dengan ratusan perwakilan Panitia Nagori juga dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagori (BPMN) Kabupaten Simalungun, Senin 06 Maret 2023 di Kantor DPRD Simalungun

"Dengan alasan tersebut, ratusan perwakilan panitia pemilihan Pangulu Nagori di hadapan Komisi I dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori menyatakan sikap mundur dan tidak akan menyerahkan data-data yang sudah dikerjakan mereka selama tahapan Pilpanag,

"Kalau memang tidak akan dibayarkan lagi honor dan biaya-biaya yang sudah kita keluarkan, kita akan mundur. Kita juga tidak akan memberikan data-data yang sudah kita kerjakan,"kata Salah seorang Perwakilan Panitia Nagori yang hadir di Komisi I DPRD Simalungun

Sementara Kepala DPMPN Simalungun Sarimuda Purba dalam kesempatan itu menerangkan, dalam pelaksanaan Pilpanag, pihaknya hanya mengerjakan sesuai mekanisme dan penganggaran yang sudah tercatat di DPA DPMPN Simalungun.

Untuk biaya honor sebanyak 4 kali, yang dituntut oleh Panitia Nagori, "Untuk honor itu hanya dua kali bayar, Rp400 ribu untuk ketua panitia, dan anggota Rp300 ribu,"kata Sarimuda Purba yang dituangkan di berita acara hasil RDP

Terkait dengan ATK, Kepala Dinas DPMPN Kabupaten Simalungun menjelaskan, bahwa ATK sudah diserahkan DPMPN kepada Masing-masing Camat,"ujar Kepala DPMPN Simalungun Sarimuda Purba dalam berita acara hasil RDP dengan Komisi 1 DPRD Simalungun

Sementara itu, Ketua Pilpanag Nagori lainnya mengatakan, bahwa mereka sudah bekerja sejak November 2022 dan sesuai SK akan bekerja sampai Juli 2023 yakni bekerja selama 8 bulan,"sebutnya

Sementara, menyikapi hal yang terjadi terhadap Panitia Pilpanag Nagori, Komisi I mengeluarkan beberapa rekomendasi, dan akan melakukan pembahasan lebih detail terhadap permasalahan yang ada di pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) se-Kabupaten Simalungun,"sebutnya

Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun mengusulkan anggaran Rp 17 miliar di Rancangan Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2023 untuk pelaksanaan

Pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) di 248 Nagori (Karmel,rel).